

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN LSM DI ACEH

XXXXXXXXXXXX ©©© XXXXXXXXXXXXXXX

Tabrani Yunis
CCDE, Aceh

Tabrani Yunis adalah direktur Center for Community Development and Education (CCDE) di Banda Aceh. Tabrani aktif di dunia Ornop sejak tahun 1991 sampai sekarang. Ia menyelesaikan sarjana pendidikannya di Jurusan Bahasa Inggris, pada tahun 1989. Kegiatan CCDE yang dipimpinnya memfokuskan perhatian pada pengembangan masyarakat dan pendidikan & pelatihan bagi kelompok dampingan untuk masalah lingkungan hidup, peningkatan pendapatan dan usaha kecil, pemberdayaan perempuan melalui pembentukan kelompok usaha kecil perempuan, dan penyediaan modal usaha kepada kelompok dampingan.

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN LSM DI ACEH

Latar Belakang

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sebutan lunak dari Ornop (organisasi non pemerintah) yang diadopsi dari istilah Internasionalnya Non Governmental Organization (NGO) selama ini semakin populer di tanah air. Lembaga yang menurut Aswab Mahasin (1989) kelahirannya di Indonesia pada tahun 1970 an ini, kini telah merambah ke seluruh pelosok tanah air, sampai ke desa-desa. Di samping karena pertumbuhan dan perkembangannya yang sangat pesat tersebut, pemerintah juga sangat berperan dalam mempopularkan nama institusi ini karena munculnya label Ornop sebagai lembaga yang menjadi lawan pemerintah. Label yang kemudian muncul karena sikap kritis Ornop yang selalu mengkritisi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang sentralistis, tidak partisipatif (top down) dan terlalu menekankan pada ekonomi dan sebagainya. Sikap kritis ini, kemudian telah menempatkan Ornop pada posisi yang salah satunya sebagai social control yang mengontrol aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. LSM kemudian semakin populer karena munculnya sentimen negatif antara LSM (Ornop) dengan pemerintah yang akhirnya membuat pemerintah kebakaran jenggot.

Tulisan ini tidak akan melakukan sebuah pengkajian (analisis) yang mendalam dan kritis, karena hanya memaparkan tentang cikal bakal, pertumbuhan dan perkembangan organisasi non pemerintah (Ornop) atau yang sekarang lebih sering disebut dengan nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh. Oleh sebab itu, pemaparan dalam tulisan ini lebih menekankan pada deskripsi historis tentang kelahiran, latar belakang (historical background), program dan kegiatan, tantangan dan prospek Ornop-Ornop di Aceh dalam konteks masa lalu, masa kini dan esok.

Kelahiran dan Perkembangan LSM di Aceh

Berbicara soal kelahiran Ornop di Aceh, pada hakikatnya telah berembrio sejak sebelum tahun 1970 an. Karena pada saat itu di Aceh telah ada organisasi yang dibentuk oleh kalangan orang-orang di luar pemerintahan dalam bentuk yayasan keagamaan seperti halnya dayah. Keberadaan dayah sebagai organisasi di luar pemerintahan yang menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh umat dengan menjalankan usaha-usaha pemberdayaan rakyat melalui jalur pendidikan dan peningkatan kualitas serta pendapatan rakyat. Yayasan-yayasan tersebut tidak dikenal sebagai sebuah Ornop atau sebuah lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1974 sebuah Ornop kelahiran Jakarta, 23 September 1957, datang dan membuka kantornya di Aceh. Lembaga ini bergerak di bidang Keluarga berencana, yakni Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Sebelum PKBI Aceh hadir di Banda Aceh, PKBI juga telah lebih dahulu hadir di Aceh Timur pada tahun 1963. Namun kehadiran PKBI di Aceh Timur pada tahun 1963 dan kehadirannya di kota Banda Aceh pada tahun 1974 tersebut, barangkali, tidak dapat kita katakan sebagai sebuah kelahiran, karena Ornop tersebut lahir di luar Aceh dan kemudian didrop ke daerah seperti Aceh. Apalagi secara struktural, PKBI Aceh memiliki sistem kepengurusan yang sangat struktural. Demikian

juga halnya dengan Ornop Save The Children Foundation (SCF) yang hadir ke Aceh pada tahun 1976. Ornop ini adalah sebuah Ornop Amerika yang pada tahun 1976 memulai kegiatannya di Aceh sebagai pelaksana program di daerah Aceh dengan sebutan Aceh program. Sekali lagi bahwa kehadiran kedua Ornop tersebut ke tanah rencong pada saat itu bukanlah sebagai sebuah kelahiran dan belum dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan. Hal ini disebabkan oleh arah dan sifat kegiatan yang dilakukan saat itu tampaknya sangat sempit dan berorientasi kepada program (*program oriented*). Masyarakat Aceh sendiri pada saat itu tidak mengenalnya sebagai Ornop (LSM).

Di dalam catatan sejarah kelahiran LSM di Aceh, LSM tersebut baru mulai tumbuh satu persatu sejak tahun 1970an. Hal ini ditandai oleh lahirnya Yayasan Badan Koordinasi Pengembangan Sosial Masyarakat (YAPSM) di kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie. Institusi ini tercatat sebagai sebuah Ornop sebagaimana kehadirannya termuat di dalam direktori LSM Aceh. Maka, kehadiran yayasan ini barangkali dapat dikatakan sebagai embrionya Ornop di Aceh yang kelahirannya diprediksikan sebagai dampak dari kehadiran Save The Children di daerah Tangse yang menjadi daerah binaan SCF pada saat itu. Dilihat dari tujuan pendiriannya, yayasan ini bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam berbagai sektor. Tiga tahun kemudian, pada tanggal 5 Mei 1979 di Aceh Besar, berdiri pula sebuah yayasan badan pengembangan masyarakat (YBPSM) yang memiliki tujuan yang sama yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan daerah binaan berada di daerah Lamteuba, Aceh Besar. Daerah Lamteuba juga desa binaan SCF sejak tahun 1976. Pada tahun 1980 lahir pula sebuah Ornop baru Yayasan Panglima Polem yang membawa misi memajukan pengajaran pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi kehadiran Ornop ini juga tidak dikenal sebagai sebuah Ornop (LSM). Entah pada saat itu memang belum ada istilah Ornop, entah pula karena istilah LSM sendiri seperti ditulis Sabastian Saragih dalam buku kecilnya Membedah Perut LSM (1993) baru muncul pada tahun 1978 yang nama tersebut diusulkan oleh Dr. Sarino Mangun Pranoto pada pertemuan Ornop yang bergerak di bidang pembangunan Perdesaan di Ungaran 1978.

Dalam perkembangan selanjutnya embrio Ornop di Banda Aceh khususnya dan di Aceh umumnya, mulai membiak satu persatu dengan cara membelah diri pada dekade 1980 an. Sehingga pada dekade ini kelahiran Ornop (LSM) terjadi lebih cepat dibandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1970 an. Di awal dekade 1980 an, pada tahun 1982 kelahiran Ornop diawali dengan berdirinya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK). Ornop ini didirikan oleh beberapa kaum akademisi yang mengajar di kampus. Ornop bertujuan memberdayakan masyarakat konsumen dengan memberikan bimbingan pada konsumen serta mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Kehadiran lembaga ini pada saat itu, belum menunjukkan citra diri Ornop yang kritis. Lalu, setahun kemudian beberapa dosen FKIP pada tanggal 11 Maret 1983 mendirikan Yayasan Kemakmuran Bangsa (YKB) yang diketuai oleh Drs. Abdullah Faridan, juga dalam kepengurusannya termasuk nama Drs. Hasbalah Saad, MS. Gerak pertumbuhan Ornop di Aceh mulai menampakkan tanda-tanda berkembang biak pada tahun 1980an, sehingga dapat dikatakan sebagai tahun perkembangan awal munculnya Ornop-Ornop di Aceh. Karena pada tahun 1980an tersebut, Ornop (LSM) mulai berkembang biak satu persatu di Aceh pada dekade 1980an tersebut. Pada dekade ini inisiatif aktivis kampus mulai tumbuh dan berkembang dengan membangun atau mendirikan Ornop (LSM) melalui sebuah proses perkembangbiakan yang membelah diri. Kelahiran Ornop-Ornop pada saat itu lahir dari sebuah idealisme atau cita-cita untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di perdesaan yang miskin dan marginal. Dengan demikian secara sederhana kita melihat bahwa arah

perjuangan Ornop pada saat itu adalah pada pemberdayaan rakyat miskin melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya masih sangat karitatif seperti halnya kegiatan income generating, pendidikan ketrampilan dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menjawab persoalan kemiskinan, belum pada advokasi.

Ketika yang namanya pembangunan yang berpola kapitalisme dan sentralistik telah membawa dampak negatif terhadap kehidupan rakyat dengan melebarnya *social gap*, hilangnya partisipasi rakyat pada proses pengambilan keputusan, kerusakan lingkungan hidup yang kian parah, dan hal-hal lain yang merugikan rakyat, kepedulian aktivis di Aceh kian muncul dan meningkat. Maka berawal dari sebuah sikap kepedulian terhadap kehidupan rakyat yang banyak menjadi korban pembangunan yang menyebabkan terjadinya pemiskinan baik secara struktural maupun absolut, maka kepedulian tersebut telah mendorong orang-orang terutama dari kalangan kampus di Aceh mendirikan Ornop- Ornop. Gerak langkah itu semakin terasa dan nyata, pada tahun 1985. Ketika itu sebuah forum studi kependudukan dan lingkungan Hidup yang disingkat dengan sebutan Forsikal, dimotori oleh Atqia Abubakar secara resmi didirikan. Perhatian Ornop ini diarahkan kepada persoalan terhadap masalah kependudukan yang berimplikasi terhadap masalah lingkungan hidup. Ornop ini hadir, mengemban visi dan misi untuk penguatan rakyat. Pasca kelahiran Forsikal, dua tahun kemudian, pada tahun 1987 dengan visi yang semakin berkembang, muncul Yadesa, sebuah Ornop juga didirikan oleh beberapa orang aktivis kampus yang peduli dan *committed* terhadap masyarakat yang rentan. Lalu setahun kemudian, pada tahun 1988 beberapa orang dosen Unsyiah dari kalangan perempuan mendirikan sebuah lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK).

Tingkat kelahiran Ornop di Aceh pada dekade 1980an mengalami percepatan ketika Yadesa yang dimotori oleh Mansur Muhammad Kiran mulai menarik para aktivis kampus yang memiliki kepedulian dan idealisme untuk pemberdayaan rakyat ke Yadesa. Pendek kata, Mansur M. Kiran yang menjadi direktur Yadesa, pada saat itu mulai membuka wawasan para aktivis kampus untuk terjun dunia Ornop. Mansur Muhammad Kiran yang dosen tersebut mengajak beberapa aktivis kampus bergabung ke Yadesa dengan melibatkan para aktivis kampus tersebut ke dalam kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Yadesa. Para aktivis ini diajak belajar bersama, mengunjungi lapangan dan melakukan kegiatan-kegiatan diskusi. Dari kegiatan-kegiatan ini, para aktivis tersebut kemudian mendapatkan pengalaman dari pelatihan (*training*) baik di dalam Ornop sendiri maupun di luar seperti hal pelatihan yang dilakukan oleh lembaga atau Ornop di luar Aceh. Pengalaman ini menjadi modal bagi para aktivis kampus tersebut untuk terjun ke dalam masyarakat. Apalagi pada saat jumlah mereka kian bertambah, kegiatan Yadesa yang masih terbatas saat itu, membuat para aktivis tersebut, berpikir semakin kritis. Menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dengan program yang sedikit dan jumlah aktivis yang banyak, akhirnya dari beberapa diskusi yang mereka lakukan, lahirlah ide-ide untuk menangani masalah masyarakat miskin sesuai dengan isu dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing aktivis. Mereka mencari wadah alternatif untuk menghubungkan mereka dengan masyarakat di perdesaan. Maka pada saat itu, para aktivis yang memiliki potensi dan keahlian yang berbeda-beda tersebut memutuskan untuk melahirkan wadah baru. Pada tahun 1989 Maimul Fidar, salah satu aktivis kampus yang telah belajar banyak dari Yadesa tersebut mendirikan Ornop baru yakni Citra Desa Indonesia (CDI) yang bergerak di bidang lingkungan. Lalu diikuti kemudian pada tahun yang sama juga, Suraiya Kammaruzaman dan kawan-kawan mendirikan Yayasan Flower Aceh yang khusus menangani isu-isu perempuan. Kelahiran Ornop dari kubu Mansur

tersebut pada saat itu kebetulan mendapat dukungan dari LELI Program (Learning and Linkage Program). Sehingga, mereka dapat memulai program-program keornopon dengan tanpa harus mencari lembaga-lembaga dana untuk memulai program mereka.

Di luar kubu Mansur, pada tahun yang sama juga lahir lembaga-lembaga baru yang lebih concern terhadap persoalan keagamaan. Tercatat pada saat itu ada dua Ornop baru yang lahir yaitu UMMAHAT yang menangani masalah pembinaan ibu balita dan remaja serta Yayasan Pendidikan Islam (YPI) dengan program kerja pengembangan pesantren, pertanian, peternakan dan pengembangan masyarakat.

Mengacu pada tingkat pertumbuhan dan perkembangan Ornop di Aceh pada dekade 1980an, dapat kita simpulkan betapa lambatnya tingkat pertumbuhan dan perkembangan Ornop di Aceh. Dan apabila kita mengikuti daur perkembangan organisasi, maka Ornop-Ornop di Aceh pada tahun 1980an sedang berada pada stadium bayi. Sebagai bayi, Ornop-Ornop di Aceh masih sangat membutuhkan sentuhan tangan-tangan terampil dari Ornop-Ornop lain di luar Aceh. Sehingga pada masa-masa ini kalangan aktivis dan pegiat Ornop/LSM Aceh banyak belajar dari Ornop di luar Aceh baik yang ada di Sumatera, maupun di pulau Jawa.

Satu hal yang menggembirakan di dalam proses perkembangan Ornop di Aceh pada saat itu, walaupun jumlah Ornop masih tergolong kecil, semangat untuk saling berbagi informasi, semangat untuk berjaringan tumbuh dengan baik. Kelahiran Ornop yang satu persatu tersebut menimbulkan niat untuk membentuk jaringan (net working) di kalangan aktivis dan Ornop. Keinginan tersebut ditelusuri dengan melakukan pertemuan-pertemuan informal untuk membahas masalah rencana membangun sikap kebersamaan di kalangan Ornop (LSM) pada tahun 1989-1990. Ide-ide itu muncul dilandasi oleh tampaknya fenomena pertumbuhan Ornop (LSM) pada dekade 1980an dan prediksi ke depan. Kenyataannya memang kelahiran dan pertumbuhan LSM mulai terasa cepat denyutnya, terjadi pada dekade 1990an. Pertumbuhan LSM (Ornop) di Aceh pada dekade ini mulai tampak subur. Hal ini ditandai oleh lahirnya banyak LSM (Ornop) yang bukan saja ada di Banda Aceh, tetapi juga di daerah-daerah. Mulai banyaknya LSM (Ornop) yang lahir, pada tahun 1990 tersebut, kalangan LSM yang telah melakukan pertemuan-pertemuan informal sejak tahun 1989 akhirnya pada tahun 1990 ide-ide akan perlunya mempersatukan gerak langkah LSM di Aceh terrealisasi. Pada tanggal 24 Januari 1990 dibentuk Forum Regional Lembaga Swadaya Masyarakat (FR-LSM) Daerah Istimewa Aceh yang berfungsi sebagai wahana komunikasi dan informasi bagi LSM-LSM yang ada di Aceh. Keberadaan Forum pada saat itu masih sebatas working group, sebagai pusat informasi yang bukan sebagai payung bagi LSM-LSM lain. Fungsinya pada saat itu direncanakan sebagai jembatan yang tidak untuk membesarkan dirinya sendiri, tetapi untuk memperkuat partisipan.

Terbentuknya FR-LSM Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1990 sedikit banyaknya ikut mendorong lahirnya Ornop-Ornop atau LSM baru pada dekade 1990an. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya kalangan yang berminat dan terpenggil untuk mendirikan LSM terutama dari kalangan yang telah memahami ideologi dan pekerjaan-pekerjaan LSM itu sendiri. Sehingga pertumbuhan LSM pada dekade ini tergolong cepat. Berdasarkan data yang dicatat dalam katalog LSM Aceh yang terdaftar sebagai anggota Forum LSM Aceh sebanyak 43 LSM ditambah dengan 11 Dayah atau pesantren. Secara rinci dapat disebutkan sebagai berikut. Tahun 1990 ada dua LSM yang lahir yakni Cordova Banda Aceh yang didirikan oleh Otto Syamsuddin Ishak dan kawan-kawan serta

Satyapitala, Aceh Tenggara. Pada tahun 1991 tercatat 3 LSM, masing-masing BP2SM, UMAHAT, dan LP2SM yang dibidani oleh Mirdas Ismail dkk. Jumlah LSM bertambah dengan lahir 6 LSM pada tahun 1992. Ke enam LSM tersebut adalah Yayasan Pugar yang dimotori Ridwan Anggie Munthei, Yayasan Sinar Desa Indonesia (Yasindo) yang didirikan oleh Mansur Muhammad Kiran, (setelah ia meninggalkan Yadesa), LPSELH, LPLH di Lhok Seumawe, Aceh Utara dan Suara Hati Rakyat (Sahara) di Sawang Aceh Utara. Pertumbuhan LSM pada tahun 1993 ada 6 LSM masing-masing Center for Community Development and Education (CCDE), Forum Aktivitas Ketrampilan dan Teknologi Aceh (FAKTA), The Pamualen Foundation, Teratai Foundation, Yayasan kesejahteraan masyarakat Indonesia (YAKMI), dan YAPDA di Aceh Utara. Sementara pada tahun 1994 hanya dua LSM muncul, yakni Pakat Tabela yang bergerak di bidang pembelaan Hukum dan Yayasan Pengembangan Wanita (YPW) di Takengon, Aceh Tengah. Pada tahun 1995 mengalami tingkat pertumbuhan yang sama dengan tahun 1993 karena adar 6 LSM baru yang lahir dan dengan bidang garapan yang semakin bervariasi. Ke enam Ornop tersebut adalah Yayasan Gardamadina di Kecamatan Manggeng, Aceh Selatan yang lahir dari kelompok basis pondok pesantren, Labinal di Sigli, Pidie yang kelahirannya dibidani oleh aktivis LSM, Medika Indonesia yang bergerak di bidang Kesehatan, Pase dengan program-program lingkungan hidup dan konservasi, Yayasan Anak Bangsa yang menangani isu anak-anak jalanan, dan YaSi yang bergerak di bidang pendidikan agama bagi remaja. LSM kelahiran tahun 1996 masing-masing-masing Rumpun Bambu Indonesia, yayasan Biduk Alam (YBA) Aceh Timur, dan lain-lain.

Angka kelahiran Ornop/LSM di Aceh yang semakin pesat terjadi pada tahun 1996 hingga akhir 1997. Pesatnya pertumbuhan Ornop pada masa 1996/1997, ikut didorong oleh adanya program pengentasan kemiskinan yang dirancang oleh pemerintah Indonesia seperti program IDT, KUT dan yang terakhir program JPS, P3DT dan program PPK yang notabene melibatkan Ornop. Ornop yang lahir dari program ini disinyalir sebagai pengalihan LSM untuk mensukseskan program-program pemerintah tersebut. Namun pertumbuhan yang bersifat massive, besar-besaran, seperti jamur yang tumbuh di musim hujan di Aceh adalah ketika negeri yang kata orang sono, miracle economic growth ini dihantam badai krisis moneter. Krisis moneter yang membuat ekonomi Indonesia ambruk tersebut dan menyebabkan runtuhnya lembaga-lembaga ekonomi yang berimplikasi terhadap kehilangan lapangan pekerjaan, mendorong orang-orang yang kehilangan pekerjaan ikut melirik Ornop dan mendirikan Ornop. Di samping itu, terjerembabnya Soeharto dari kursi kekuasaan, ikut mendorong pertumbuhan Ornop (LSM) di Aceh. Jatuhnya rezim Soeharto yang ditandai dengan lengsernya sang Presiden yang terlama berkuasa ini, gerak pertumbuhan LSM di Aceh menjadi semakin kencang. Bahkan dengan momen itu kalangan Ornop (LSM) sekaligus melakukan reposisi.

Dalam konteks Aceh, sebagai daerah yang terseret ke dalam konflik politik yang berkepanjangan dan menyengsarakan rakyat karena tingginya tindak kekerasan negara (state violence), berupa pembunuhan, penghilangan orang dan penyiksaan dan lain-lain yang menyebabkan meningkatnya tingkat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tanah rencong ini, menyebabkan munculnya Ornop-Ornop yang memperjuangkan nasib orang-orang tertindas dan korban pelanggaran HAM. Kondisi masyarakat Aceh yang tertindas, bukan saja menyebabkan bermunculannya berbagai macam LSM, tetapi juga gerakan pembela hak azasi dari berbagai pihak terutama mahasiswa. Kini di Aceh telah terjadi yang namanya booming LSM. Karena pertumbuhan dan perkembangan Ornop di Aceh mencapai 3 kali lipat dari jumlah LSM yang ada pada tahun 1996 yang hanya ada sekitar 41 Ornop yang terdaftar sebagai anggota FR-LSM Aceh. Sementara data yang ada di

forum LSM Aceh saat ini jumlah anggota tetap Forum LSM Aceh yang mendaftar sebagai anggota berjumlah 104 NGO ditambah dengan 25 calon anggota. Sementara yang tidak terdaftar masih sangat banyak dan kini terus bertambah jumlahnya. Diperkirakan saat ini jumlahnya sudah melebihi 200 Ornop.

Munculnya Aliansi Baru

a. Walhi

Di samping pertumbuhan Ornop yang semakin cepat, di Aceh dalam waktu yang tidak begitu lama muncul pula aliansi, koalisi maupun konsorsium Ornop yang baru, pasca pembentukan FR-LSM Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1990. Kehadiran jaringan, aliansi, koalisi baru ini mengarahkan Ornop/LSM di Aceh untuk dapat memperkuat perjuangan dan kerja sama melalui jaringan berdasarkan concern lembaga masing-masing. Oleh sebab itu ketika usia Forum regional LSM Aceh baru sekitar 3 tahun. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta, pada tahun 1993 mulai membentuk forum WALHI di Aceh. Pada saat itu disebut dengan Forum Daerah (Forda) yang menjadi wadah bagi Ornop-Ornop yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Kehadiran WALHI sebagai forum daerah juga ikut mendorong munculnya Ornop-Ornop baru sejalan dengan semakin mencuatnya persoalan-persoalan lingkungan hidup di Aceh yang meminggirkan dan memiskinkan masyarakat serta menimbulkan masalah-masalah sosial budaya. Banyaknya kasus eksplorasi sumber daya alam yang mengorbankan rakyat, seperti eksploitasi hutan secara membabi buta oleh para pemilik HPH dengan munculnya berbagai kasus perusakan lingkungan seperti kasus perusakan hutan oleh para pengusaha HPH di Aceh. Menurut catatan WALHI Aceh bahwa disamping minimnya kontribusi ekonomi HPH terhadap APBD, Aceh dihadapkan pada kerusakan hutan yang sangat parah. Karena dari tahun 1982 hingga 1993 laju deforestation mencapai 2.4 juta hektar yang jelas-jelas dirusak oleh HPH.

Kini, ketika Forum Daerah Walhi Aceh telah berubah nama menjadi WALHI Aceh, pertumbuhan Ornop atau LSM baru, semakin bertambah. Ornop/LSM tidak saja lahir di kota Banda Aceh, akan tetapi kini merambah ke setiap daerah tingkat II hingga di tingkat kecamatan. Kelahiran Ornop/LSM baru tersebut memilih ruang gerak yang semakin spesifik. Berdasarkan data yang diperoleh dari WALHI Aceh, saat ini jumlah anggota dan calon anggota di Walhi Aceh berjumlah 55 LSM di mana sekitar 30 diantaranya adalah Ornop (LSM) yang baru berdiri, sementara selebihnya adalah Ornop/LSM yang sudah lahir sebelumnya.

b. Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA)

Kelompok ini didirikan pada tanggal 15 Oktober 1995 sebagai tindak lanjut (*follow-up*) dari pelatihan *Gender Sensitivity*. Bentuk organisasinya adalah sebuah jaringan yang beranggotakan lembaga-lembaga (Ornop) dan individu yang memiliki komitmen untuk menegakkan keadilan *gender*. Latar belakang terbentuknya jaringan ini dilandasi pada landasan konstitusi, UUD 1945 yang secara tegas menjamin bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak, kewajiban dan kesempatan yang sama sebagai perencana, pelaksana dan penerima manfaat pembangunan. Kemudian dari realitas empiris dan sosial terjadinya ketimpangan di mana tidak seimbang hubungan antara laki-laki dengan perempuan.

Kenyataan menunjukkan masih kurangnya akses dan aset dan kontrol perempuan terhadap sumber daya yang strategis. Perempuan masih mengalami diskriminasi, subordinasi dan marginalisasi, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Di samping itu, masih sangat banyak perempuan yang mengalami tindak kekerasan dan menanggung beban kerja yang berat. Karena di dalam realitas empiris dan kebanyakan kebijakan formal cenderung belum seimbang hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Maka untuk mencapai keadilan *gender* yang merupakan suatu konstruksi sosial yang mengatur hak, kewajiban, peranan, tanggung jawab dan harapan antara laki-laki dan perempuan, KKTGA bermaksud untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan anggota dalam rangka memperbesar kontribusi dalam mensosialisasikan keadilan *gender*, di samping itu bertujuan untuk mengupayakan perubahan kebijakan ke arah yang lebih mendukung keadilan *gender*.

Sejalan dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, baik yang dilakukan oleh negara dalam konflik politik di Aceh, maupun kekerasan di dalam rumah tangga (*domestic violence*) di Aceh, KKTGA sebagai sebuah jaringan yang *concern* dengan masalah tersebut, pada tahun 1998 memberikan pelayanan pembelaan (advokasi) dan konseling kepada perempuan-perempuan yang membutuhkannya secara gratis melalui Women Crisis Center. Di samping itu juga melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan bagi masyarakat.

c. SULöH (Jaringan Informasi dan Pemberdayaan Rakyat)

Setiap kelahiran atau terbentuknya sebuah jaringan Ornop, biasanya memiliki latar belakang sejarah (*historical background*). Begitu juga halnya dengan kelahiran SULöH yang menjadi jaringan informasi dan pemberdayaan rakyat ini. SULöH yang didirikan oleh 11 Ornop Aceh pada tanggal 12 Desember 1996 ini lahir dilatarbelakangi oleh sebuah kondisi rakyat yang menjadi korban pembangunan. Kondisi rakyat yang kehilangan partisipasi kritis terhadap pembangunan karena dihilangkan untuk alasan stabilitas keamanan. Adanya pelanggaran terhadap hak politik rakyat, hak ekonomi, sosial, budaya serta hak atas persamaan di depan hukum dan akhirnya UU tentang penyeragaman organisasi, kebijakan asas tunggal, UU pemerintahan desa dan lain-lain sebagai bagian dari bentuk-bentuk kebijakan politik yang pada kenyataannya menghegemoni hak-hak politik rakyat, serta adanya monopoli ekonomi, mengutamakan modal besar, dan berorientasi pada industri telah menyebabkan hilangnya akses rakyat terhadap sumber ekonomi dan pasar menjadi latar belakang lahirnya SULöH.

Kelahiran SULöH juga dilatarbelakangi oleh posisi dan kondisi Ornop yang pada saat itu dipandang masih belum mempunyai jati diri yang jelas karena masih ada Ornop yang tidak melakukan pemberdayaan rakyat karena terus selamanya menjaga kemesraan dengan pemerintah untuk menyelamatkan diri, bukan untuk menyelamatkan rakyat. Kemudian pada saat itu, para aktivis pendiri jaringan ini juga merefleksikan bahwa visi keornopan dalam realitasnya masih sangat beragam, sehingga cita-cita kelahirannya dirasakan belum tegas. Padahal cita-cita kelahiran Ornop adalah untuk memperkuat kesadaran politik rakyat sehingga mereka memiliki kesadaran politis dan kekuatan negosiasi untuk melahirkan sebuah keputusan.

Banyaknya muncul kasus-kasus perampasan tanah, pengalihan tata ruang tanah secara sewenang-wenang, eksploitasi sumber daya alam, pelanggaran hak sipil dan politis, *grass violation*, monopoli ekonomi, pelemahan budaya lokal dan lain juga menjadi pertimbangan

untuk melahirkan sebuah jaringan yang disebut SULÖH. Kelahiran SULÖH dijadikan sebagai wadah berjaringan, berkomunikasi, tukar informasi bagi anggota jaringan dan mitra kerja lainnya sebagai sebuah kebutuhan. SULÖH pada saat itu melihat bahwa pola hubungan kekuasaan yang sama sekali tidak memihak kepada rakyat. Karena pola pembangunan yang kapitalistik dan sentralistik dengan penekanan pada pembangunan ekonomi yang telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, telah pula menghilangkan partisipasi rakyat pada setiap proses pengambilan keputusan. Akibatnya pembangunan tersebut kehilangan makna. Kehilangan partisipasi rakyat terhadap pembangunan tersebut memberi makna bahwa rakyat bukan saja akan kehilangan akses untuk mengontrol sumber daya ekonomi, tetapi juga kehilangan akses terhadap kehidupan politik yang demokratis.

Maka kehadiran SULÖH sebagai sebuah jaringan bercita-cita agar terciptanya ruang gerak yang memungkinkan rakyat mampu mengekspresikan dirinya, menentukan nasibnya sendiri dan memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya. Oleh sebab itu SULÖH mengemban misi untuk mendorong tumbuhnya gerakan sosial yang kuat untuk terwujudnya perubahan sosial. Kini SULÖH sebagai sebuah jaringan yang beranggotakan 12 Ornop ini dan bertujuan memperkuat posisi rakyat, bersama anggota jaringannya selama ini memfokuskan kegiatan pada pemberdayaan masyarakat tani melalui wadah Perhimpunan Masyarakat Tani Aceh (PERMATA) yang terbentuk dari himpunan kelompok tani dampingan Ornop anggota jaringan serta pada persoalan-persoalan pertanahan yang dihadapi oleh rakyat kecil.

d. Koalisi NGO-HAM

Koalisi NGO HAM adalah lembaga advokasi HAM yang bersifat nirlaba, non partisan serta memiliki mandat untuk membangun aliansi dengan NGO regional, nasional dan internasional. Koalisi NGO HAM sendiri merupakan kumpulan beberapa Ornop yang peduli (*concern*) terhadap penegakkan HAM di Aceh. Koalisi ini didirikan pada tanggal 3 September 1998 yang dilatarbelakangi oleh sikap kepedulian dan keprihatinan terhadap tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh. Dari sikap kepedulian dan keprihatinan tersebut aktivis dan NGO yang *concern* dengan penegakan HAM terpanggil untuk mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh selama daerah ini dijadikan sebagai daerah Operasi Militer (DOM). Di samping itu, lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi momentum yang tepat bagi koalisi NGO HAM Aceh untuk mengungkapkan semua tragedi pelanggaran HAM di Aceh selama berlangsungnya operasi militer 1989-1998. Oleh sebab itu, para aktivis dan NGO peduli HAM Aceh menyatukan langkah dalam melakukan advokasi bersama terhadap korban pelanggaran HAM di Aceh. Untuk mengungkapkan fakta-fakta di lapangan, koalisi ini melakukan pendataan korban dan mengkampanyekannya melalui berbagai media massa dan internet.

Sebagai sebuah jaringan yang tergolong baru, Koalisi NGO HAM menginginkan terwujudnya tatanan masyarakat madani yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, berkeadilan sosial, berperspektif *gender* dan demokratis. Adapun misi yang diemban oleh lembaga ini adalah sebagai lembaga advokasi HAM dengan tugas menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menegakkan HAM di Aceh. Ada 3 isu strategis yang akan dicapai oleh lembaga ini. Ketiga isu strategis tersebut adalah (1) bagaimana agar pemerintah dan lembaga militer bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Aceh. (2) perubahan tatanan politik di Aceh dan isu ketiga (3) agar perjuangan HAM di Aceh menjadi agenda dan perhatian (*concern*) masyarakat internasional.

Di samping adanya jaringan atau koalisi dan forum yang disebutkan di atas dan konsorsium yang ada di Aceh, Ornop-Ornop di Aceh selama ini banyak menjalin hubungan kerja sama dan menjadi anggota dari jaringan Ornop di tingkat regional, nasional dan internasional. Hubungan kerja sama dan jaringan yang terbanguna di tingkat regional Sumatera misalnya melalui WIM Sumatera Utara, jaringan Heifer Project International Bukit Tinggi dan lain-lain. Di tingkat nasional antara lain menjadi mitra dan anggota seperti Yasppuk Jakarta, Yappika, LP3ES, ELSAM, Bina Swadaya, Bina Desa, Jari, INPI Pact, Bangun Mitra Sejati dan lain-lain. Sementara untuk Jaringan internasional, masing-masing lembaga biasanya ikut membangun jaringan kerja sama yang erat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan rakyat di Aceh saat ini.

Berdasarkan deskripsi di atas, kita dapat melihat bahwa kelahiran Ornop-Ornop di Aceh pada dekade 1970an hingga dekade 1980an mengalami pertumbuhan yang lamban dan evolusif. Latar belakang kelahiran Ornop-Ornop pada masa ini juga lahir dari sebuah keprihatinan dan kepedulian terhadap kehidupan kaum miskin yang tertindas dan marginal sebagai akibat dari pola pembangunan yang tidak memihak kepada rakyat kecil.

Sementara pada dekade 1990an, kelahiran Ornop yang mengalami percepatan, dilatar belakangi oleh berbagai kondisi yang semakin kompleks seperti kemiskinan, eksploitasi sumber daya alam dan hutan, *setting* politik orde baru yang mengekang kebebasan rakyat dengan alasan stabilitas nasional menjadi pemicu muncul tumbuh dan lahirnya Ornop di Aceh pada dekade 1990an hingga tahun 1996 dan pertengahan 1997. Terjadinya booming Ornop di Aceh pada tahun 1997 hingga tahun 2000 mencapai angka 200 lebih, dilatarbelakangi oleh banyak faktor sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman, kondisi ekonomi, sosial politik dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa krisis moneter yang melanda Indonesia sejak Juli 1997 hingga saat ini telah menyebabkan rusaknya sendi perekonomian Indonesia yang berimplikasi kepada persoalan sosial seperti terjadinya PHK pada perusahaan-perusahaan perbankan dan lain-lain. Kondisi ini telah ikut mendorong orang-orang yang ter PHK atau para kontraktor yang bangkrut semasa krisis berupaya mendirikan NGO. Tahun 1997-2000, sebagai periode krisis moneter, yang membuat pemerintah berhadapan dengan masalah kemiskinan yang meningkat dan harus mencari alternatif usaha pengentasan kemiskinan melalui berbagai program yang dibiayai dengan hutang luar negeri seperti halnya program Jaring Pengaman Sosial (social Saffety Net Program) telah melahirkan Ornop-Ornop yang menjadi *stakeholder* bagi pelaksanaan program tersebut karena program hutang yang menuntut agar dipantau oleh Ornop tersebut, juga menjadi pendorong tingginya tingkat kelahiran Ornop. Runtuhnya kursi kekuasaan Soeharto yang ditandai dengan peristiwa lengser keprabon pada tanggal 21 Mei 1998, dan derasnya arus reformasi telah membuka klep-klep kesadaran masyarakat untuk bangkit dari penindasan yang panjang. Hal ini mendorong semakin banyak tumbuhnya Ornop. Dan secara kontekstual, dalam konteks ke Aceh-an, di mana Aceh yang dalam percaturan politik dijadikan korban sandiwara elit-elit politik, yang menyengsarakan rakyat Aceh, banyaknya kasus pelanggaran HAM, tingginya angka tindak kekerasan yang dilakukan oleh negara melalui kekuatan militernya telah mendorong orang dari berbagai kalangan mendirikan Ornop, yang diharapkan dapat memperjuangkan nasib rakyat Aceh yang tersiksa, tertindas dan diperas oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak mengherankan bahwa pertumbuhan Ornop dan aliansi atau jaringan Ornop di Aceh pada era ini lebih dari 3 kali lipat.

Tingginya angka pertumbuhan Ornop di Aceh saat ini menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dicermati. Banyak kalangan yang mempertanyakan soal menjamurnya Ornop di Aceh dewasa ini. Di kalangan Ornop sendiri melihat pertumbuhan Ornop yang sangat pesat tersebut dari dua sisi. Sisi pertama dilihat sebagai sebuah peluang di mana dengan semakin banyaknya jumlah Ornop yang eksis, berarti akan semakin bertambah kekuatan rakyat dan posisi rakyat lebih kuat, sehingga masyarakat madani yang dicita-citakan, dapat dicapai dengan cepat. Namun di pihak lain, pertumbuhan Ornop yang sangat pesat dapat mengancam eksistensi Ornop tersebut. Alasannya adalah saat ini banyak Ornop jadian yang dilahirkan sebagai jembatan untuk mencapai sesuatu atau kehendak seseorang atau bahkan untuk menyelamatkan program-program pemerintah. Dalam realitas yang ada, banyak Ornop yang terlibat di dalam program yang dilaksanakan oleh pemerintah ikut terlibat dalam berbagai kasus penyelewengan, seperti dalam kasus KUT, JPS dan lain-lain.

Di mata masyarakat atau publik, kelahiran Ornop di Aceh dalam jumlah yang besar selama waktu 1997 hingga 2000 ini menimbulkan berbagai persepsi. Banyak kalangan mengatakan bahwa Ornop saat ini sedang naik daun, sedang banyak uang dan sebagainya. Persepsi-persepsi semacam ini secara langsung atau tidak langsung memancing motivasi kalangan kaum oportunistik untuk ikut mendirikan Ornop sebagai kendaraan untuk mencari popularitas dan sebagainya. Sebaliknya, menjamurnya jumlah Ornop di Aceh saat ini dipandang sebagai momentum pembelaan rakyat dan momentum untuk mengungkapkan dosa-dosa pemerintahan pusat terhadap rakyat.

Dari uraian tentang kelahiran dan pertumbuhan Ornop di Aceh sejak dekade 1970an hingga kini, kiranya telah dapat memberikan jawaban kepada kita terhadap pertanyaan mengapa Ornop itu ada. Pertanyaan yang mengarah pada visi dan misi Ornop itu didirikan. Pada hakikatnya, terasa sangat sulit untuk mengatakan dalam artian mengeneralisasikan visi dan misi Ornop di Aceh. Karena apabila kita berbicara soal visi dan misi, akan sangat tergantung kepada Ornop itu sendiri. Karena masing-masing Ornop memiliki visi dan misi yang berbeda sesuai dengan program dan gerakan yang dilakukan, kondisi politik dan sebagainya. Karena selama ini ada dikotomi terhadap gerakan Ornop yang ada di Indonesia. Dikotomi tersebut mengelompokkan Ornop-Ornop tersebut berdasarkan visi-misi dan program dan kegiatan yang dilakukan Ornop. Sebagaimana lazimnya Ornop-Ornop yang ada di Indonesia, untuk daerah Aceh paling kurang ada empat jenis Ornop yang eksis. Keempat jenis Ornop tersebut adalah Ornop yang tergolong kedalam kelompok Ornop developmentalis, Ornop advokatif, reformis dan transformatif. Namun, sesuai dengan kondisi daerah Aceh yang dilanda konflik, kecenderungan gerakan Ornop sekarang berada pada gerakan advokasi dan transformasi yang menginginkan terjadinya perubahan tatanan masyarakat yang memberikan kekuatan kepada rakyat (*people power*).

Terlepas dari dikotomi tersebut, jumlah Ornop di Aceh di masa depan dilihat dari fenomena sosial saat ini, menunjukkan akan semakin tumbuh dan semakin beragam baik dari segi program dan kegiatan maupun dari sudut personalnya. Kaum perempuan di Aceh telah mulai menampilkan partisipasi aktif mereka dengan membuat gerakan-gerakan baru seperti munculnya deklarasi “Serikat Inong Aceh” dan lain-lain. Munculnya gerakan kaum perempuan Aceh kini, karena mereka mulai menyadari posisi mereka. Mereka sadar bahwa untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan di Aceh, harus diupayakan pula oleh kaum perempuan bersama-sama kaum laki-laki. Oleh sebab itu mereka perlu merebut peran yang aktif dalam melakukan penguatan rakyat.

Ada pertanyaan yang sering dilontarkan oleh banyak orang terhadap Ornop-Ornop yang ada di Aceh saat ini. Pertanyaan tersebut mempertanyakan dari mana sumber dana Ornop-Ornop tersebut? Dalam pertanyaan yang sederhana adalah “siapa yang mendanai Ornop-Ornop di Aceh selama ini?” Barangkali, pertanyaan ini juga sangat mudah untuk dijawab. Ketika Ornop-Ornop itu mulai dibentuk, sumber dana yang mereka miliki biasanya diawali dengan dana sendiri yang ada pada saat pendirian Ornop tersebut. Artinya menjalankan kegiatan berdasarkan swadana. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, Ornop-Ornop tersebut melalui jalinan jaringan kerja yang dibangun di setiap lini, sumber dana tersebut dapat bersumber dari Ornop-Ornop yang ada di Jakarta atau dari lembaga-lembaga dana yang *concern* dengan program yang dijalankan dan bersedia memberikan kontribusinya terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Ornop dengan satu prinsip tidak mengikat, hibah (*grants*) yang dijadikan dana bergulir (*revolving fund*), bukan hutang dan sebagainya. Sehingga akuntabilitasnya yang pertama ditujukan kepada lembaga dana melalui audit yang dilakukan oleh lembaga dana maupun akuntan publik independent yang ditunjuk oleh lembaga dana. Dan pertanggung jawaban juga ditujukan kepada masyarakat sendiri sebagai kelompok penerima manfaat dengan cara memberikan akses kontrol kepada mereka untuk mengontrol penggunaan dana dan sebagainya. Dengan cara melibatkan masyarakat sebagai pihak yang mengontrol kegiatan dan penggunaan dana, maka tingkat akuntabilitas Ornop tersebut dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Sebagai sebuah ilustrasi saja, ketika Yayasan Program Pemulihan Keberdayaan Masyarakat (PKM) membantu Ornop-Ornop yang ada di Aceh dalam upaya memulihkan keberdayaan masyarakat sebagai dampak dari krisis moneter, menerapkan sistem kontrol yang berlapis dan partisipatif. Ornop yang menerima bantuan dari dana PKM akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diperoleh melalui pemeriksaan atau audit keuangan dari lembaga independent. Sementara kontrol sosial akan dilakukan oleh masyarakat yang menerima bantuan secara partisipatif dimana setiap anggota kelompok dampingan terlibat langsung dalam mengontrol setiap pengeluaran yang dilakukan Ornop yang mendampingi mereka. PKM dalam hal ini menjalankan prinsip transparansi dan bertanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap Ornop atau KSM penerima bantuan PKM dan memberikan akses kontrol kepada masyarakat penerima bantuan (*beneficiaries*).

Hubungan Ornop Dengan Negara dan Pemerintah

Keberadaan Ornop sebagai lembaga-lembaga yang melakukan *pressure* terhadap pemerintah selama ini tentu membuat hubungan di antara keduanya menjadi tidak begitu akrab. Masing-masing pihak ingin memosisikan diri pada posisi mereka masing-masing. Maka, berbicara soal bagaimana Ornop di Aceh melihat negara dan pemerintah pada hakikatnya sangat tergantung kepada keberadaan model Ornop yang dibangun. Maksudnya, dalam dunia keornopan sekarang ini, kita harus melihat mana Ornop yang bergerak berdasarkan hati nurani yang memihak kepada rakyat dan mana yang memihak kepada para penguasa (pemerintah). Kalau Ornop yang bergerak berdasarkan hati nurani yang *committed* dengan nasib rakyat, tentu saja dapat diartikan hubungan Ornop tersebut dengan pemerintah di mana Ornop memosisikan dirinya sebagai alat kontrol sosial yang menjalankan fungsi terhadap setiap kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Bagi Ornop yang radikal di Aceh, memandang negara dalam artian pemerintahan adalah sebuah kekuasaan yang menindas rakyat Aceh, penghisap darah dan sangat kejam terhadap rakyat, tidak berperilaku kemanusiaan dan lain-lain. Namun bagi Ornop yang lahir

dari sebuah komitmen sebagai mediasi, memandang pemerintah adalah mitra kerja yang baik dan perlu menggalang kerja sama yang erat dalam melakukan program-program pembangunan. Di pihak pemerintah sendiri, sebenarnya melihat Ornop dalam kaca mata yang hipokrit. Di satu pihak Ornop dianggap oleh pemerintah sebagai mitra dalam kegiatan pembangunan, seperti apa yang dialami pada saat pemerintah merancang program IDT, KUT dan JPS. Posisi Ornop di sini ditempatkan sebagai mitra yang berfungsi melancarkan program pengentasan kemiskinan saat itu, demikian juga halnya dengan kondisi saat ini. Di pihak lain, karena sikap kritis dan radikalnya, Ornop dianggap sebagai sebuah kekuatan oposan. Sehingga keberadaan Ornop diklaim sebagai pihak-pihak pengkhianat terhadap negara, yang semua pekerjaannya menjelek-jelekkan negara dan sebagainya.

Oleh sebab itu, pertumbuhan dan perkembangan Ornop di Aceh di era reformasi ini menjadi indikator untuk melihat bagaimana hubungan antara Ornop dengan pemerintah dan masyarakat sipil. Ketika kita berbicara tentang masyarakat sipil, kiranya perlu dipertanyakan dahulu masyarakat sipil yang mana. Karena bisa saja sekelompok orang yang berkepentingan mengatasnamakan masyarakat sipil dan sebagainya. Namun dengan lahirnya banyak Ornop di Aceh selama ini dilatarbelakangi oleh lemahnya posisi masyarakat sipil terhadap kekuasaan pemerintah menjadi sebuah indikator bahwa hubungan masyarakat sipil dengan pemerintah kurang harmonis. Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan masyarakat sipil dengan pemerintahan di Aceh saat ini memang berada dalam kondisi disharmonis, di mana posisi masyarakat sipil semakin terjepit, tertindas dan teraniaya di tengah konflik politik yang tiada henti. Kondisi masyarakat sipil yang terjepit dan tertindas tersebut telah memicu munculnya perlawanan masyarakat sipil terhadap pemerintah yakni apa yang terjadi dengan aksi mogok makan, mogok kerja secara masal pada 2-4 Agustus 1999 yang melumpuhkan semua aktivitas pemerintahan. Kemudian di Aceh Utara masyarakat sipil juga kembali mogok masal selama satu minggu pada bulan Oktober 1999 dan kemudian bergeraknya masyarakat sipil pada tanggal 8 Nopember 1999 dalam pawai referendum. Sementara hubungan interaksi Ornop dengan masyarakat sipil selama ini tidak menunjukkan adanya disharmonisasi. Mungkin karena keberpihakan Ornop umumnya jelas dan tetap memihak kepada masyarakat sipil, masyarakat miskin, kecil dan tertindas.

Rekomendasi dan Diskusi

1. Kelahiran dan pertumbuhan Ornop yang semakin pesat di daerah-daerah di satu pihak merupakan sebuah kekuatan bagi eksistensi Ornop dalam memberdayakan rakyat, namun di pihak lain, kehadiran Ornop yang menjamur tersebut perlu dicermati karena akan dapat mengancam eksistensi Ornop secara umum. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk menyatukan visi dan misi yang tepat dalam memperkuat posisi rakyat sipil.
2. Seiring dengan tumbuhnya jaringan dan koalisi antar Ornop di daerah-daerah saat ini dipandang sebagai sebuah gerakan penguatan Ornop dalam memberdayakan anggotanya dalam rangka mempercepat proses demokratisasi yang terwujud dalam konsep masyarakat madani.
3. Ornop perlu memposisikan dirinya sebagai sebuah institusi penguatan rakyat yang lebih kritis dengan tidak melibatkan diri dalam program-program yang dijalankan pemerintah. Posisi Ornop lebih ditekankan pada posisi kontrol.

DISKUSI

Pertanyaan

1. Cami (Bangun Mitra Sejati, Jakarta)
Bagaimana visi Ornop Aceh ke depan, kaitannya dengan kebijakan OTODA di Aceh. Mungkin ada upaya yang dilakukan untuk menyatukan visi untuk membangun Aceh?
2. Kusumastuti (SMERU, Jakarta)
Dorongan apa yang menyebabkan munculnya banyak LSM di Aceh? Apakah dapat digambarkan dengan diskripsi (peta)?
3. Mochtar Abbas (Yayasan Mitra Usaha, Jakarta)
 - Apakah Ornop di Aceh merupakan anak cabang dari Jakarta (misalnya PKBI, Bina Desa, YLKI, dll)?
 - Bagaimana sebenarnya ide GAM dilihat dari perspektif Ornop di Aceh. Bagaimana kontribusi dari Ornop terhadap ide-ide berkaitan dengan GAM (misalnya Referendum)?

Jawaban

1. Perkembangan Ornop di Aceh sangat banyak. Persoalan visi ke depan berkaitan dengan OTODA kelihatannya mengarah pada pemberdayaan masyarakat (masyarakat sipil yang tertindas). Secara pasti LSM menginginkan bahwa masyarakat Aceh terlepas atau keluar dari ketertindasan.

Pembicara tidak yakin apakah benar OTODA ini akan dilaksanakan (kelihatannya pemerintah masih setengah hati), sehingga menjadi sulit untuk melihatnya dari perspektif Ornop. Masalahnya apakah visi ini dapat tercapai? Sangat tergantung dari banyak hal!

2. ORNOP juga dapat dijadikan sebagai kendaraan untuk mencari popularitas, jalan-jalan ke luar negeri. Banyak Ornop yang mempunyai keinginan untuk memberikan bantuan semata (bersifat karitatif). Selain itu, banyak LSM yang lahir karena adanya berbagai program pemerintah (KUT, JPS dll). Pembicara tidak dapat memberi tahu Ornop mana yang termasuk dalam kategori tersebut.
3. Ornop di Aceh lahir dari proses pembelajaran dari pihak-pihak di luar (Bina Desa, PKBI) dan lebih kepada proses pendewasaan Ornop di Aceh.

Ornop-Ornop masih berjalan dalam garis keornop-annya. Tetapi dari pihak militer, Ornop dianggap sebagai pihak yang “berpihak” pada GAM, karena lebih memperhatikan terhadap korban-korban yang diakibatkan oleh kekerasan militer dan tidak sebaliknya. Tidak semua Ornop berpihak pada munculnya Referendum, karena awalnya hanya beberapa (misalnya SIRA)

Komentar Moderator

1. Bagaimana Ornop mempunyai satu perspektif, misalnya dalam melihat partisipasi masyarakat. Dalam kaitan ini, Ornop seharusnya mempunyai agenda yang jelas dan perspektif yang sama dalam melihat partisipasi masyarakat.
2. Dari beberapa contoh terlihat ada kekhawatiran bias aktivitas dari Ornop.